

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A., Awan, Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Alfabeta.
- Agus, D. (2014). Perkembangan pengaturan jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka perlindungan hukum buruh/pekerja. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–20.
- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking* (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2022). Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2/PERDIR.03/012022 tentang (Petunjuk Teknis Pembayaran Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan). <https://bpjsketenagakerjaan.go.id/>
- Bungin, B. (2003). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Husni, L. (2014). *Pengantar hukum ketenagakerjaan*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang (Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan). <https://kemnaker.go.id/>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang (Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

<https://kemnaker.go.id/>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (n.d.). Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Diakses 21 April 2026, dari

<https://jkip.go.id/>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (n.d.). Sistem Informasi Aplikasi Penempatan Kerja (SIAP Kerja). Diakses 21 April 2026, dari

<https://siapkerja.kemnaker.go.id/>

Kompas. (2024, Januari 16). Program jaminan kehilangan pekerjaan masih seret.

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/16/program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih-seret>

Liputan6. (2021, Maret 10). Kemnaker: 72.983 pekerja kena PHK selama pandemi

Covid-19. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>

Mahendrasusila, F. (2021). Dampak penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan terhadap sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), 1–15.

Mardalis. (2010). *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara.

Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan publik: Cara mudah memahami kebijakan publik*. CV. AA Rizky.

Mukhid. (2021). Metodologi penelitian pendekatan kualitatif. CV Jakad Media Publishing.

Pasolong, H. (2012). Metode penelitian administrasi publik. Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
<https://peraturan.bpk.go.id/>

Pratiwi, N. P. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Tesis, Universitas Islam Riau). Repositori Universitas Islam Riau.

Putri, N. A. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Repositori IPDN.

Ragiliawan, Z., & Gunawan, B. T. (2021). Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam perspektif belanja negara. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(1), 45–60.

Ridwan, F. (2023, Oktober 3). Upah minimum rendah di Indonesia: Apa dampaknya bagi kesejahteraan pekerja? *Kumparan*.
<https://kumparan.com/ridwan-firman-1727665005346637699/upah-minimum-rendah-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kesejahteraan-pekerja-23cpzF7m4jS>

Silitonga, C. O., & others. (2022). Prospek pemberian jaminan kehilangan pekerjaan guna memberikan perlindungan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(1), 78–95.

Subijanto. (2011). Peran negara dalam hubungan tenaga kerja Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(6), 112–130.

Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kualitatif R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.

Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 46A–46E.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang (Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. PT Bumi Aksara.

Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Center for Academic Publishing Service.

Yin, R. K. (2014). Studi kasus desain & metode (Edisi Indonesia). Rajawali Pers.

